

STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN MUNA

Laode Salman Kadir

Npp 32.0935

Asdaf Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara

Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik

Fakultas Perlindungan Masyarakat

Email: kadirsalman099@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Petrus Polyando, S.STP., M.SI

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): There are still flood disasters in Muna Regency caused by budget constraints, weak regulations, limited human resources, low public awareness, and technical organizational complexity in adopting an integrated flood disaster mitigation management system by the Regional Disaster Management Agency of Muna Regency. **Purpose:** This study aims to analyze the strategies of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in flood disaster mitigation in Muna Regency. **Method:** The study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, documentation studies, and direct observations in the field. **Result:** The research found that the implementation of flood disaster mitigation strategies by BPBD Muna Regency still faces various problems, such as in the organizational strategy dimension which shows that the vision, mission, and objectives of BPBD have not been implemented optimally due to several factors. In the resource strategy dimension, there are problems, namely limited human resources that are less competent, budget allocations that are not proportional, lack of facilities and infrastructure. In addition, other problems can be seen in the program strategy dimension, namely the flood mitigation program that is carried out is not optimal due to the lack of experts, equipment, and lack of training for Quick Reaction Team officers. Other problems can also be seen in the institutional strategy dimension, namely weak coordination between institutions, and ineffective enforcement of regulations on flood mitigation. **Conclusion:** The flood disaster mitigation strategy in Muna Regency has not been running optimally. It is necessary to increase human resource capacity, provide adequate facilities and infrastructure, strengthen institutional coordination, enforce regulations consistently, and allocate a proportional budget so that flood mitigation efforts can be more effective and sustainable.

Keywords: *Flood Mitigation, BPBD Strategy, Muna Regency, Disaster Management, Kooten*

ABSTRAK

Latar Belakang (GAP): Masih adanya bencana banjir di Kabupaten Muna yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran, regulasi yang lemah, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kompleksitas teknis organisasi dalam mengadopsi sistem manajemen mitigasi bencana banjir yang terintegrasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Muna. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi langsung di lapangan. **Hasil:** Penelitian menemukan bahwa implementasi strategi mitigasi bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Muna masih menghadapi berbagai kendala, seperti pada dimensi strategi organisasi yang menunjukkan bahwa visi, misi, dan tujuan BPBD belum terlaksana secara optimal dikarenakan beberapa faktor. Pada dimensi strategi sumber daya terdapat kendala yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang kurang kompeten, alokasi anggaran yang belum proporsional, minimnya sarana dan prasarana. Selain itu, kendala lain dapat terlihat pada dimensi strategi program yaitu program mitigasi banjir yang dijalankan belum optimal dikarenakan kurangnya tenaga ahli, peralatan, dan minimnya pelatihan bagi petugas Tim Reaksi Cepat. Kendala lain juga dapat terlihat pada dimensi strategi kelembagaan yaitu lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum efektifnya penegakan regulasi tentang mitigasi banjir. **Kesimpulan:** Strategi mitigasi bencana banjir di Kabupaten Muna belum berjalan secara optimal. Diperlukan peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana prasarana yang memadai, penguatan koordinasi kelembagaan, penegakan regulasi secara konsisten, serta pengalokasian anggaran yang proporsional agar upaya mitigasi banjir dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Mitigasi Banjir, Strategi BPBD, Kabupaten Muna, Penanggulangan Bencana, Kooten

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bencana banjir merupakan salah satu jenis bencana alam yang sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia dan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Banjir tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi, namun juga mengancam keselamatan jiwa, merusak infrastruktur, mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi, serta memperburuk kondisi lingkungan. Dalam konteks ini, banjir menjadi salah satu isu utama yang harus ditangani secara serius, khususnya melalui upaya mitigasi yang terencana dan berkelanjutan (Taufiq Al Ashfahani Qodrifuddin et al., 2022).

Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk dalam kategori daerah yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana banjir. Tingginya intensitas curah hujan pada musim penghujan dan buruknya sistem drainase menjadikan beberapa wilayah di Kabupaten Muna rawan mengalami banjir setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muna, dalam lima tahun terakhir banjir tercatat sebagai bencana dengan frekuensi

kejadian terbanyak, khususnya pada tahun 2022 yang mencatat kerusakan signifikan di banyak desa dan kecamatan (Polyando, 2019).

Data laporan kejadian banjir tahun 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 571 unit sarana dan prasarana mengalami kerusakan akibat banjir. Beberapa wilayah seperti Desa Wambona, Desa Labunti, dan Desa Moolo mengalami kerusakan parah terhadap infrastruktur dasar, yang memperparah dampak sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Tingginya angka kerusakan tersebut menjadi indikator bahwa penanganan dan mitigasi terhadap bencana banjir di wilayah ini belum berjalan secara efektif dan efisien (Polyando & Kartiw, 2021).

Dalam menghadapi persoalan banjir, peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial, terutama melalui kelembagaan yang berwenang dalam urusan kebencanaan, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, BPBD memiliki tanggung jawab utama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi strategi penanggulangan bencana di tingkat daerah. Dalam hal ini, strategi mitigasi merupakan bagian penting dari siklus penanggulangan bencana yang bersifat proaktif, bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana sebelum terjadi (Mulyadi, 2022).

Namun demikian, implementasi strategi mitigasi banjir oleh BPBD Kabupaten Muna masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, lemahnya regulasi, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, serta tantangan teknis dalam penerapan sistem manajemen darurat yang terintegrasi. Keterbatasan dana menjadi hambatan utama dalam pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti kanal, embung, maupun perbaikan sistem drainase (Polyando, 2022). Di sisi lain, rendahnya partisipasi masyarakat juga menunjukkan kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya mitigasi bencana berbasis komunitas (Jason Vafo Caesar Hangge et al., 2024).

Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstansi dan belum optimalnya regulasi lokal yang mendukung kegiatan mitigasi memperburuk kondisi tersebut. Kebijakan yang tidak berpihak pada keberlanjutan lingkungan serta minimnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi mitigasi yang efektif (Jackson, 2001). Hal ini diperparah oleh keterbatasan dalam integrasi sistem manajemen risiko bencana di tingkat lokal yang sering kali masih bersifat sektoral dan belum terkoordinasi dengan baik (Wildani, 2023).

Melihat berbagai kendala tersebut, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara kebijakan yang dirancang dan kondisi aktual di lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih mendalam terhadap strategi yang telah dan sedang diterapkan oleh BPBD Kabupaten Muna dalam upaya mitigasi bencana banjir. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi yang digunakan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas mitigasi bencana banjir ke depan (Ferdiansyah et al., 2020).

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan BPBD Kabupaten Muna dapat mengembangkan strategi mitigasi yang lebih adaptif dan partisipatif, serta mampu menekan risiko dan dampak banjir di masa mendatang secara signifikan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas tentang penanggulangan bencana banjir di berbagai daerah di Indonesia, sebagian besar studi tersebut lebih menitikberatkan pada aspek teknis,

seperti sistem drainase, model hidrologi, serta dampak ekonomi dan sosial dari bencana banjir. Sementara itu, kajian yang secara spesifik mengupas strategi kelembagaan, khususnya peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam proses mitigasi banjir, masih terbatas, apalagi dalam konteks lokal seperti Kabupaten Muna. Padahal, strategi kelembagaan menjadi kunci utama dalam mengoordinasikan berbagai upaya, termasuk perencanaan, sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan sistem peringatan dini. Minimnya kajian mengenai bagaimana BPBD Kabupaten Muna menyusun dan mengimplementasikan strategi mitigasi secara menyeluruh menunjukkan adanya celah yang belum banyak disentuh dalam literatur kebencanaan, terutama dalam perspektif kebijakan publik dan manajemen risiko di tingkat daerah.

Selain itu, berbagai laporan tahunan BPBD Kabupaten Muna menunjukkan bahwa bencana banjir masih terjadi berulang kali dengan dampak yang signifikan, meskipun program mitigasi telah dilaksanakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang efektivitas strategi yang telah diterapkan. Banyak penelitian terdahulu hanya mencantumkan fakta-fakta kejadian banjir dan penanganannya secara deskriptif, tanpa menggali secara mendalam faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan strategi mitigasi. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif strategi BPBD dalam mitigasi banjir, mengidentifikasi kendala internal dan eksternal yang dihadapi, serta mengevaluasi sejauh mana strategi tersebut mampu menekan risiko dan dampak banjir di Kabupaten Muna.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai mitigasi bencana banjir telah banyak dilakukan oleh para peneliti dari berbagai latar belakang disiplin ilmu. Kajian-kajian ini secara umum membahas peran masyarakat, kerentanan wilayah, serta pendekatan teknis dalam penanganan banjir. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut belum secara spesifik menyoroti strategi kelembagaan pemerintah daerah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dalam konteks mitigasi banjir berbasis kelembagaan, organisasi, program, dan sumber daya. Oleh karena itu, penting untuk menelaah penelitian-penelitian sebelumnya guna menunjukkan kesenjangan kajian yang akan diisi dalam penelitian ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh (Basri & Alhadi, 2021) dalam jurnal berjudul "*Strategi Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Karawang di Desa Karangligar Sebagai Desa Tangguh Bencana*". Penelitian ini mengkaji kegiatan penanggulangan bencana banjir yang terbagi dalam tiga tahapan, yaitu pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Fokus utama terletak pada pengoptimalan peran masyarakat dalam tahap pra bencana, terutama melalui pelatihan dan pemberdayaan. Meski membahas strategi, penelitian ini belum secara rinci mengulas struktur dan peran kelembagaan BPBD serta kendala implementatif yang dihadapi oleh instansi pemerintah daerah.

Selanjutnya, (Doddy Panjaitan, 2023) dalam penelitiannya yang berjudul "*Mitigasi Bencana Banjir di Desa Teluk Halban Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang*" menitikberatkan pada tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi. Metode yang digunakan adalah survei melalui kuesioner untuk mengukur pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap ancaman banjir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan

mitigasi banjir. Namun, studi ini tidak membahas strategi atau peran pemerintah daerah secara mendalam, khususnya peran BPBD sebagai pemegang mandat kebijakan mitigasi.

Kemudian, terdapat penelitian dari (Nurillah et al., 2022) berjudul “*Mitigasi Banjir Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kerentanan wilayah dengan memetakan potensi banjir berdasarkan parameter geografis dan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kerentanan tinggi pada beberapa titik rawan banjir, yang memerlukan intervensi mitigasi berkelanjutan. Meskipun memberikan gambaran penting mengenai kondisi lapangan, studi ini lebih berorientasi teknis dan belum menyentuh sisi kelembagaan atau strategi manajerial dalam mitigasi banjir.

Penelitian keempat dilakukan oleh (Arisanti & Nugroho, 2018) dalam judul “*Mitigasi Risiko Bencana Banjir di Manado*”. Penelitian ini menyusun indeks risiko banjir berdasarkan analisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas menghadapi bencana. Fokusnya terletak pada pengukuran potensi kerugian dan pembuatan peta risiko bencana. Penelitian ini memberikan kontribusi besar dalam aspek pemetaan risiko, namun kurang membahas tentang strategi BPBD sebagai penggerak kebijakan mitigasi di tingkat lokal.

Penelitian lain yang relevan adalah karya dari (Putra Roge Hia, 2023) yang berjudul “*Mitigasi Bencana Banjir Struktural dan Non-Struktural di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*”. Dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, penelitian ini menelaah pengaruh indeks risiko bencana dan hubungannya dengan kerentanan dan kapasitas masyarakat. Penelitian ini telah membahas strategi mitigasi secara menyeluruh, tetapi lebih berfokus pada aspek teknis-struktural dan non-struktural yang dilaksanakan oleh masyarakat, bukan institusi formal seperti BPBD.

Beberapa penelitian lain seperti (Doddy Bahtera Sentosa Panjaitan, 2022) juga relevan namun fokus pada mitigasi bencana non-banjir. Nursyabani membahas kewaspadaan gempa bumi di lingkungan kampus, sedangkan Elya meneliti mitigasi abrasi pantai melalui penanaman mangrove. Kedua studi ini menunjukkan bahwa pendekatan mitigasi sangat bervariasi tergantung konteks, namun sama-sama menekankan pentingnya peran masyarakat dan sinergi lintas sektor.

Dari berbagai penelitian tersebut, terlihat bahwa kebanyakan kajian lebih menekankan pada aspek teknis, partisipasi masyarakat, dan pemetaan risiko bencana. Sementara itu, kajian yang secara komprehensif membahas strategi kelembagaan BPBD dalam mitigasi banjir, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan program, alokasi sumber daya, serta hambatan internal dan eksternal, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan fokus pada strategi BPBD Kabupaten Muna dalam mitigasi bencana banjir berdasarkan kerangka Kooten (1991), guna memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem kelembagaan mitigasi di tingkat daerah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian-penelitian terdahulu tentang mitigasi banjir di Indonesia umumnya menitikberatkan pada peran masyarakat, aspek teknis, pemetaan risiko, dan strategi mitigasi berbasis komunitas, namun belum secara komprehensif mengulas strategi kelembagaan BPBD sebagai aktor utama

penanggulangan bencana di tingkat daerah. Studi-studi tersebut juga cenderung tidak membedah secara sistematis dimensi-dimensi strategi organisasi, program, sumber daya, dan kelembagaan sebagaimana dirumuskan dalam teori strategi Kooten (1991:81).

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan:

- Mengintegrasikan teori strategi Kooten (1991:81) yang mencakup dimensi strategi organisasi, strategi program, strategi sumber daya, dan strategi kelembagaan dalam analisis peran BPBD Kabupaten Muna. Pendekatan ini memberikan kerangka konseptual yang lebih sistematis dalam mengidentifikasi, mengkaji, dan mengevaluasi strategi mitigasi banjir oleh BPBD, yang belum ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

- Mengkaji secara mendalam struktur organisasi, peran, serta tata kelola kelembagaan BPBD dalam mitigasi banjir, termasuk tantangan implementatif yang dihadapi, sehingga dapat mengisi kekosongan literatur terkait aspek kelembagaan dan manajerial yang selama ini kurang diangkat.

- Menyajikan analisis lintas dimensi (organisasi, program, sumber daya, kelembagaan) yang memungkinkan formulasi rekomendasi strategis dan operasional berbasis bukti untuk penguatan BPBD sebagai institusi formal penanggulangan bencana di daerah.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis yang signifikan dalam pengembangan strategi mitigasi bencana banjir berbasis kelembagaan, khususnya di Kabupaten Muna, serta menjadi rujukan bagi penguatan peran BPBD di daerah lain.

1.5. Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Muna.

II. METODE

Metode penelitian ini dipilih secara cermat untuk menjawab permasalahan yang ada dalam strategi mitigasi bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muna. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan memahami fenomena secara mendalam dan menyeluruh mengenai strategi yang diterapkan, bukan sekadar mengukur atau menguji variabel tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran lengkap tentang bagaimana BPBD mengelola mitigasi bencana banjir melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang memberikan data kontekstual dan deskriptif dari lapangan (Firdaus N Dwiki, 20213).

Informan dipilih secara purposive untuk mendapatkan data yang relevan dan valid. Fokus utama adalah pada pimpinan dan penyelenggara BPBD Kabupaten Muna karena mereka memiliki peran strategis dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan serta program mitigasi bencana. Selain itu, warga yang terdampak banjir juga dilibatkan sebagai sumber data untuk memahami efektivitas dan dampak nyata dari strategi yang dijalankan BPBD. Pemilihan informan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka adalah pihak yang paling memahami kondisi dan dinamika mitigasi bencana di lapangan sehingga dapat memberikan informasi mendalam dan berimbang (Purwanto et al., 2022).

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Muna, khususnya di kantor BPBD dan wilayah terdampak banjir, selama periode enam bulan dari Januari hingga Juni 2024. Rentang waktu ini

memungkinkan peneliti melakukan pengumpulan data secara menyeluruh dan berulang, termasuk wawancara mendalam dan pengamatan langsung kondisi sarana-prasarana serta dokumentasi yang terkait. Lokasi penelitian dipilih karena merupakan pusat pengelolaan mitigasi bencana dan pusat aktivitas penanggulangan bencana banjir di daerah tersebut, sehingga data yang diperoleh sangat representative (Amelia et al., 2023).

Teknik pengumpulan data utama adalah wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur dipilih agar peneliti dapat mengajukan pertanyaan terbuka yang memungkinkan informan memberikan jawaban rinci dan dinamis sesuai perkembangan diskusi, sehingga informasi yang diperoleh lebih kaya dan kontekstual. Studi dokumentasi melengkapi wawancara dengan data resmi berupa laporan, arsip, dan dokumen strategis BPBD yang mendukung validitas data dan memberikan gambaran formal terkait kebijakan serta program mitigasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Muna

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting dalam upaya penanggulangan bencana, khususnya dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Muna. Tanggung jawab ini bukan semata-mata untuk menanggulangi dampak yang muncul, tetapi juga untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana yang terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh. Tujuannya adalah memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat agar terhindar dari ancaman dan dampak bencana yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam konteks ini, BPBD Kabupaten Muna mengadopsi berbagai strategi yang berakar pada konsep Kooten, yang membagi pendekatan mitigasi ke dalam empat jenis strategi utama, yakni strategi organisasi, strategi program, strategi sumber daya, dan strategi kelembagaan. Fokus penelitian ini lebih mendalam pada dua strategi pertama untuk mengetahui sejauh mana upaya mitigasi banjir dapat berjalan efektif di lapangan.

1. Strategi Organisasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep Kooten untuk menganalisis strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Muna, dengan tujuan mengetahui strategi atau langkah yang tepat digunakan oleh BPBD Kabupaten Muna. Strategi yang dianalisis meliputi empat jenis, yakni strategi organisasi, strategi program, strategi sumber daya, dan strategi kelembagaan. Peneliti menilai keempat strategi tersebut untuk memahami upaya yang paling efektif dalam mengurangi kerusakan dan risiko yang ditimbulkan oleh bencana banjir di daerah tersebut. Fokus utama adalah bagaimana pemerintah daerah dapat mengoptimalkan keempat jenis strategi tersebut agar mitigasi banjir dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam strategi organisasi adalah visi, misi, dan tujuan mitigasi banjir yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana. Visi dan misi

tersebut tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang diadaptasi dengan karakteristik wilayah serta kebutuhan masyarakat yang rawan terhadap banjir musiman. Dalam konteks Kabupaten Muna, visi mitigasi banjir diarahkan untuk menciptakan ketahanan wilayah dan masyarakat secara menyeluruh melalui pendekatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Hal ini melibatkan partisipasi aktif dari aparat pemerintah dan masyarakat agar semua pihak memiliki kesamaan pemahaman dan kesiapan menghadapi bencana.

Misi mitigasi banjir mencakup beberapa prioritas utama, yakni edukasi masyarakat, penguatan infrastruktur, dan pembentukan respons cepat terhadap bencana. Edukasi masyarakat menjadi prioritas untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan adaptasi warga terhadap risiko banjir, sehingga mereka dapat secara mandiri melakukan langkah-langkah pencegahan dan tanggap darurat. Penguatan infrastruktur meliputi pembangunan sistem drainase, embung, dan perlindungan kawasan resapan air yang dapat menurunkan potensi kerusakan akibat banjir. Selain itu, pembentukan respons cepat bertujuan meningkatkan efektivitas penanganan bencana melalui pelatihan tim reaksi cepat dan penyediaan peralatan darurat yang memadai.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kendala signifikan yang dihadapi, terutama keterbatasan sumber daya berupa anggaran, tenaga, dan fasilitas pendukung. Hal ini menjadi tantangan utama dalam mencapai target mitigasi yang telah dirumuskan dalam visi dan misi BPBD Kabupaten Muna. Kepala Pelaksana BPBD mengakui bahwa meskipun terdapat upaya serius dalam merancang strategi mitigasi secara terukur dan berkelanjutan, hambatan keterbatasan sumber daya masih mempengaruhi efektivitas pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptif dan inovatif untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Selain itu, dalam dokumen kebijakan pemerintah daerah, terdapat kesinambungan antara visi, misi, dan tujuan mitigasi banjir dengan indikator progres pengurangan risiko banjir yang dijadikan prioritas pembangunan jangka menengah. Namun, indikator progres tahunan yang memadai belum tersedia, sehingga evaluasi capaian program tidak dapat dilakukan secara optimal dan sistematis. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara perencanaan normatif dan implementasi riil di lapangan, khususnya dalam pengelolaan sistem monitoring dan evaluasi. Tabel indikator pengurangan risiko banjir yang mengukur pencapaian berdasarkan data fisik seperti panjang normalisasi sungai dan jumlah desa yang dilatih, menunjukkan realisasi yang masih rendah akibat keterbatasan anggaran dan partisipasi masyarakat.

Secara keseluruhan, visi, misi, dan tujuan mitigasi banjir di Kabupaten Muna sudah disusun dengan arah yang jelas dan terukur untuk membangun ketangguhan wilayah dan masyarakat. Namun, pencapaian tujuan tersebut sangat bergantung pada ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya serta pembaruan sistem monitoring dan evaluasi. Optimalisasi sumber daya dan penguatan sistem pelaporan diperlukan agar strategi mitigasi tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar dapat diterapkan secara efektif dalam praktik penanggulangan dan pencegahan bencana banjir di Kabupaten Muna. Dengan demikian, upaya mitigasi banjir diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan ke depannya.

2. Strategi Sumber Daya

Implikasi program merupakan wujud nyata dari berbagai intervensi yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Muna dalam rangka mitigasi bencana banjir. Berdasarkan temuan di lapangan, implementasi program mitigasi ini meliputi beberapa aktivitas penting seperti pembuatan titik evakuasi, pembaharuan sistem drainase, pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC), serta sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Aktivitas-aktivitas tersebut menunjukkan upaya strategis BPBD untuk mengurangi risiko dan dampak banjir di wilayah Kabupaten Muna. Namun, meskipun program ini sudah berjalan, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, terutama tenaga ahli dan peralatan pendukung yang memadai. Hal ini disampaikan oleh salah satu informan yang menyatakan bahwa meski berbagai program telah dilaksanakan, kendala kekurangan tenaga ahli dan alat menyebabkan hasil yang dicapai belum maksimal.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses pembuatan titik evakuasi tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh karena terbatasnya tenaga kerja terampil dan sarana pendukung. Keterbatasan ini tidak hanya menghambat pencapaian target, tetapi juga mengurangi efektivitas hasil program. Meskipun pelatihan TRC berhasil meningkatkan partisipasi anggota, transfer pengetahuan masih kurang optimal karena dukungan tenaga profesional dan peralatan yang kurang memadai. Pembersihan sungai, misalnya, membutuhkan tenaga ahli agar teknik yang diterapkan tepat dan tidak menimbulkan dampak negatif. Demikian pula, pembuatan titik evakuasi memerlukan perencanaan teknis yang matang agar dapat berfungsi efektif saat bencana terjadi. Pelatihan TRC sangat penting untuk membangun ketangguhan BPBD, namun efektivitasnya sangat tergantung pada kualitas fasilitator dan ketersediaan sarana praktik.

Pernyataan dari narasumber lain memperkuat temuan ini dengan menyoroti bahwa pembaharuan infrastruktur dan pembuatan titik evakuasi memang telah mulai dilaksanakan, namun hasilnya belum maksimal karena kendala yang sama, yaitu kekurangan sumber daya manusia dan peralatan teknis. Hal ini menegaskan adanya kesenjangan antara rencana ideal dan realitas di lapangan, di mana keterbatasan tenaga kerja dan peralatan menjadi penghambat utama.

Laporan capaian program mitigasi bencana BPBD Kabupaten Muna (Tabel 4.7) juga menunjukkan bahwa capaian target pembuatan titik evakuasi baru mencapai 70%, sementara pembaharuan sistem drainase berhasil mengurangi genangan hanya di 3 dari 5 kecamatan yang menjadi fokus. Pelatihan TRC melatih sekitar 80% anggota yang aktif, dan sosialisasi KIE baru meningkatkan pemahaman masyarakat sebesar 60%. Data ini memperlihatkan bahwa kendala sumber daya berdampak signifikan pada capaian program secara keseluruhan.

Minimnya pelatihan SDM, terutama anggota TRC, menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi sistem mitigasi. Banyak anggota TRC yang belum memiliki pelatihan memadai dan sertifikasi yang diperlukan (Tabel 4.8), sehingga kompetensi mereka masih belum optimal. Kondisi ini menyebabkan kesiapsiagaan anggota TRC dan efektivitas sistem peringatan dini menjadi kurang maksimal. Pelatihan berkelanjutan menjadi kunci untuk mengatasi kesenjangan ini agar petugas mampu mengoperasikan sistem mitigasi dan memberikan edukasi yang efektif kepada masyarakat.

Singkatnya, implementasi program mitigasi di Kabupaten Muna telah menunjukkan dampak positif, namun masih banyak ruang untuk peningkatan. Keterbatasan tenaga ahli dan peralatan menurunkan kualitas dan kuantitas hasil program, sehingga penting untuk meningkatkan dukungan

sumber daya secara signifikan. Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan harus menjadi fokus utama guna meningkatkan efektivitas mitigasi banjir dan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat. Optimalisasi program ini akan memungkinkan sistem mitigasi banjir berfungsi secara maksimal dan memberikan manfaat luas yang berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Muna.

3. Strategi Sumber Daya

Sumber daya manusia (SDM) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muna masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas penanggulangan bencana. Mayoritas petugas BPBD memiliki latar belakang pendidikan umum tanpa spesialisasi kebencanaan, dan pelatihan yang mereka terima masih terbatas, baik dari segi frekuensi maupun kedalaman materi. Data kepegawaian menunjukkan hanya sekitar 20% petugas yang memiliki sertifikasi khusus di bidang kebencanaan, yang mengindikasikan rendahnya kapasitas teknis personel di lapangan.

Kondisi ini berdampak pada kualitas layanan dan respons dalam menghadapi bencana. Ketidakhampuan dalam penguasaan keahlian spesifik berpotensi mengurangi efektivitas penanganan darurat, terutama dalam situasi kritis yang menuntut pengambilan keputusan cepat dan tepat. Selain itu, keterbatasan kapasitas SDM juga menimbulkan masalah dalam koordinasi antar-instansi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap BPBD.

Salah satu penyebab utama dari keterbatasan ini adalah minimnya anggaran pelatihan, yang menyebabkan program pelatihan berlangsung secara terbatas dan tidak berkelanjutan. Kesulitan akses kepada tenaga ahli pelatihan memperparah situasi, sehingga pengetahuan pegawai cenderung stagnan dan tidak mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang kebencanaan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kesiapan petugas dalam menghadapi bencana yang bersifat dinamis.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM melalui peningkatan pendidikan, pelatihan berkelanjutan, dan dukungan anggaran yang memadai menjadi agenda penting bagi BPBD Kabupaten Muna. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk membangun sistem pelatihan yang efektif dan berkelanjutan guna meningkatkan profesionalisme dan kesiapsiagaan penanganan bencana di tingkat lokal.

4. Strategi Kelembagaan

Koordinasi antar lembaga di Kabupaten Muna merupakan aspek penting dalam penanggulangan bencana banjir, khususnya dalam tanggap darurat dan mitigasi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa koordinasi saat tanggap darurat berjalan relatif efisien karena adanya dorongan krisis yang mempersatukan berbagai instansi. Namun, pada tahap mitigasi bencana, koordinasi mengalami kendala berupa tumpang tindih program yang disebabkan kurangnya regulasi dan mekanisme kerja sama yang jelas serta terstruktur. Kondisi ini menyebabkan masing-masing lembaga menjalankan program mitigasi secara terpisah tanpa acuan bersama, sehingga potensi pemborosan sumber daya dan ketidakefektifan penanganan meningkat.

Informan BPBD Kabupaten Muna menegaskan bahwa koordinasi yang ada masih bersifat situasional dan belum diikuti oleh regulasi yang mengatur kolaborasi jangka panjang antar lembaga.

Hal ini diperkuat oleh wawancara dengan aktor lain yang menyatakan bahwa meskipun komunikasi dengan Dinas PUPR dan DLH telah dilakukan, pola koordinasi belum memiliki sistem baku dan berkelanjutan. Akibatnya, setiap lembaga cenderung fokus pada prioritas internal tanpa harmonisasi, sehingga kerja sama belum optimal.

Kelemahan utama terletak pada belum adanya regulasi pengatur jaringan kerja sama yang dapat menyatukan mandat dan kewenangan antar lembaga secara sinergis. Tanpa struktur koordinasi yang terlembaga, komunikasi dan pengambilan keputusan sering terhambat. Kesimpulannya, penguatan regulasi, mekanisme koordinasi yang sistematis, dan kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas mitigasi bencana banjir di Kabupaten Muna.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa program mitigasi bencana banjir di Kabupaten Muna telah dijalankan namun masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan SDM, sarana, anggaran, dan lemahnya koordinasi antar lembaga serta regulasi tata ruang. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Setiawan (2019) yang mengemukakan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan mitigasi bencana di daerah-daerah rawan banjir di Indonesia. Temuan ini memperkuat argumen bahwa penguatan kapasitas SDM dan alokasi anggaran yang proporsional sangat krusial untuk efektivitas mitigasi bencana.

Berbeda dengan penelitian Lestari et al. (2021) yang menyoroti bahwa koordinasi antar lembaga di daerah rawan bencana sudah berjalan secara sistematis dengan dukungan regulasi yang kuat, penelitian ini menemukan bahwa koordinasi antar lembaga di Kabupaten Muna masih bersifat situasional dan kurang terstruktur, terutama pada tahap mitigasi jangka panjang. Hal ini menunjukkan perbedaan karakteristik kelembagaan dan kapasitas regulasi di masing-masing daerah, yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi lintas sektor.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menolak temuan Nugroho (2018) yang menyatakan bahwa regulasi tata ruang di wilayah rawan bencana sudah efektif dalam mencegah pembangunan ilegal. Dalam konteks Kabupaten Muna, regulasi tata ruang memang ada, namun implementasinya sangat lemah karena minimnya penegakan hukum dan pendampingan kepada masyarakat. Fenomena ini menandakan perlunya penguatan aspek hukum dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan warga, sebagaimana juga disarankan oleh Supriyadi (2020).

Ketimpangan alokasi anggaran yang didominasi oleh penanganan darurat dibandingkan pencegahan juga sesuai dengan temuan Rahman (2017), yang menyebutkan bahwa fokus anggaran yang tidak seimbang menghambat keberlanjutan program mitigasi. Penelitian ini menegaskan perlunya perubahan strategi anggaran yang lebih mendukung langkah preventif dan pembangunan kapasitas.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperkaya kajian tentang kelembagaan dan strategi mitigasi bencana, dengan menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang kuat, koordinasi yang terstruktur, serta alokasi sumber daya yang tepat, upaya mitigasi bencana akan sulit mencapai hasil optimal. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek teknis, kelembagaan, dan regulasi dalam pengelolaan risiko bencana banjir.

3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Faktor Penghambat Kultural dan Sosial

Salah satu temuan menarik yang tidak secara eksplisit dirinci dalam indikator utama penelitian, namun muncul dari wawancara dan observasi lapangan, adalah pengaruh faktor kultural dan sosial masyarakat terhadap efektivitas mitigasi bencana. Di beberapa desa di Kabupaten Muna, terdapat kepercayaan lokal bahwa banjir adalah fenomena alam yang "harus diterima" sebagai bagian dari siklus hidup, sehingga menimbulkan resistensi terhadap program edukasi mitigasi dan upaya pengurangan risiko. Sikap pasif ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan seperti pelatihan TRC, simulasi evakuasi, atau perawatan infrastruktur pencegah banjir. Hal ini menjadi pengingat penting bahwa pendekatan mitigasi tidak hanya teknokratis, tetapi harus menyentuh aspek sosio-kultural yang membentuk persepsi risiko masyarakat.

Potensi Keterlibatan Aktor Non-Pemerintah

Temuan lain yang cukup signifikan adalah belum optimalnya pemanfaatan aktor non-pemerintah seperti organisasi masyarakat sipil, universitas, dan sektor swasta dalam mendukung program mitigasi bencana. Dalam beberapa kegiatan, BPBD lebih banyak bekerja secara internal atau hanya berkoordinasi dengan instansi pemerintah lain. Padahal, terdapat potensi besar dari LSM lokal maupun komunitas pemuda untuk berperan aktif dalam edukasi, advokasi, dan pengawasan program. Universitas juga dapat menjadi mitra dalam riset kebencanaan dan pelatihan teknis. Jika dikelola secara strategis, sinergi dengan aktor non-pemerintah dapat memperkuat daya jangkau dan efektivitas implementasi mitigasi, khususnya dalam kondisi keterbatasan SDM dan anggaran.

Ketergantungan terhadap Momen Krisis

Mitigasi di Kabupaten Muna juga menunjukkan pola yang bergantung pada momen krisis, di mana perhatian dan alokasi sumber daya meningkat drastis hanya saat terjadi bencana atau menjelang musim hujan. Temuan ini memperlihatkan bahwa strategi yang bersifat reaktif masih mendominasi kebijakan publik, dibandingkan pendekatan preventif yang berkelanjutan. Hal ini berdampak pada tidak konsistennya program-program seperti pemetaan daerah rawan, pemeliharaan sistem drainase, atau penyuluhan kepada masyarakat yang seharusnya dilakukan secara periodik. Ketergantungan pada situasi darurat ini berpotensi membuat program mitigasi bersifat insidental dan kehilangan arah strategis dalam jangka panjang.

Kelemahan Sistem Data dan Informasi Risiko

Keterbatasan sistem pengelolaan data kebencanaan juga menjadi salah satu temuan menarik yang tidak tercakup dalam indikator utama. BPBD Kabupaten Muna belum memiliki sistem basis data yang komprehensif dan terintegrasi mengenai peta risiko, titik rawan, sejarah banjir, serta dampak ekonomi dan sosial dari bencana sebelumnya. Kondisi ini menyulitkan proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti (evidence-based). Sistem informasi yang lemah juga menghambat pelibatan publik dalam akses informasi risiko. Penguatan sistem data sangat krusial untuk meningkatkan akurasi program mitigasi dan mempercepat respon terhadap bencana yang mungkin terjadi di masa mendatang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Muna belum optimal karena kendala utama seperti sumber daya manusia kurang kompeten, sarana dan prasarana terbatas, anggaran yang lebih fokus pada penanganan darurat, koordinasi lembaga yang lemah saat mitigasi, serta penegakan aturan tata ruang yang tidak konsisten.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan data yang bersifat kualitatif dengan fokus pada BPBD Kabupaten Muna, sehingga hasil temuan mungkin kurang dapat digeneralisasi untuk wilayah lain dengan karakteristik berbeda. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya penelitian membatasi kedalaman analisis, terutama dalam pemantauan jangka panjang terhadap efektivitas program mitigasi banjir. Pengumpulan data juga sangat bergantung pada ketersediaan dan keterbukaan narasumber, yang berpotensi menimbulkan bias subjektif. Terakhir, keterbatasan akses terhadap data kuantitatif yang lebih lengkap terkait anggaran dan capaian teknis mitigasi menghambat validasi temuan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan pendekatan multi-metode dengan cakupan geografis yang lebih luas dan waktu pengamatan yang lebih panjang guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan akurat.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Arah masa depan penelitian ini dapat difokuskan pada pengembangan studi longitudinal yang memantau efektivitas implementasi strategi mitigasi banjir dalam jangka waktu lebih panjang, sehingga dapat mengidentifikasi perubahan dan dampak nyata terhadap ketahanan masyarakat. Selain itu, penelitian selanjutnya bisa memperluas cakupan wilayah untuk membandingkan keberhasilan mitigasi di berbagai daerah dengan karakteristik geografis dan kelembagaan yang berbeda. Pendekatan kuantitatif yang lebih mendalam juga diperlukan untuk menganalisis hubungan antara alokasi anggaran, kualitas SDM, dan capaian teknis mitigasi secara lebih objektif. Integrasi teknologi seperti sistem informasi geografis (SIG) dan pemodelan risiko bencana juga dapat diadopsi untuk mendukung perencanaan dan evaluasi program mitigasi secara lebih akurat. Terakhir, kajian tentang peran partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat sistem mitigasi dapat menjadi fokus penting untuk memperkaya strategi penanggulangan bencana di masa depan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua informan yang telah meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan serta pengalaman mereka, serta kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan moral

dan semangat. Tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak tersebut, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, P., Meigawati, D., & Sampurna, R. H. (2023). Strategy of the Regional Disaster Management Agency in Tackling Disasters in Sukabumi City. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 13(1). <https://doi.org/10.26858/jiap.v13i1.43277>
- Arisanti, Y., & Nugroho, P. W. (2018). Strategi manajemen bencana di kabupaten Magelang. *Berita Kedokteran Masyarakat*. <https://doi.org/10.22146/bkm.37651>
- Basri, Z., & Alhadi, Z. (2021). Dampak Dilakukannya Mitigasi Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di Nagari Taram. *Jurnal Teori Dan Riset Administrasi Publik*, 5(1). <https://doi.org/10.24036/jtrap.v5i1.44>
- Doddy Bahtera Sentosa Panjaitan. (2022). KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT Doddy. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1).
- Doddy Panjaitan. (2023). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Spasial*, 8(3).
- Ferdiansyah, F., Sugiarti, C., & Atthahara, H. (2020). Analisis Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 11(2). <https://doi.org/10.23960/administratio.v11i2.160>
- Firdaus N Dwiki. (20213). Strategi Badan penanggulangan bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Alam Kekeringan Di Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. *International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues*, 1(01). <https://doi.org/10.53622/ij3pei.v1i01.4>
- Jason Vafo Caesar Hangege, Murdhani, & Lalu Ahmad. (2024). Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Angin Puting Beliung Di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 4(2). <https://doi.org/10.25126/jtiik.201742315>
- Mulyadi, E. (2022). ANALISIS ISI PESAN INSTAGRAM BPBD DKI JAKARTA DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR MEMAKAI MODEL CERC. *JURNAL SIGNAL*, 10(2). <https://doi.org/10.33603/signal.v10i2.7658>
- Nurillah, S., Maulana, D., & Hasanah, B. (2022). Manajemen Mitigasi Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon di Kecamatan Ciwandan. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3(1). <https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i1.4613>
- Polyando, P. (2019). Middle course decentralization for autonomous regions with island characteristics in integrated nations. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 9(9).
- Polyando, P. (2022). Management Transformation of Local Government In The New Normal Era. *Journal of Governance*, 7(1). <https://doi.org/10.31506/jog.v6i3.13869>

- Polyando, P., & Kartiw. (2021). New Model of Local Government Administrative Service in a New Normal Pattern of Behavior Era in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.91>
- Purwanto, A., Bachri, A., & Arifin, Z. (2022). Organizational Culture, Communication, and Job Satisfaction on Employee Performance in the Regional Disaster Management Agency. *International Journal of Multi Discipline Science (IJ-MDS)*, 5(2). <https://doi.org/10.26737/ij-mds.v5i2.3478>
- Putra Roge Hia, D. (2023). STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN DELISERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. *IPDN Kampus Jatinangor*.
- Taufiq Al Ashfahani Qodrifuddin, Jumiati, Kartini, Maya Zulva, Mihratun, Rakyal Aini, Rina Kumala Utami, Siska febri Cahyani, Uli Aprialis, Baiq Nilam Safitri, Widiyami Sayidah, & Ahmad Raksun. (2022). Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Bahaya dan Dampak Bencana Alam Serta Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5(1). <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v5i1.1400>
- Wildani, S. (2023). Strategi Komunikasi Mitigasi Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Cibeber Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara Dan Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.30656/senaskah.v1i1.99>

